

## Perubahan Penggunaan Alat Tangkap Nelayan dan Pengaruhnya terhadap Aktivitas Kenelayanan di Kabupaten Cilacap, 1970-1985

Ruslan Abdul Gani, Sutejo K. Widodo\*

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

\*sutejokw@yahoo.com

### Abstract

*This article discusses two problems, namely changes in fishing technology and effects of these changes on fishing activities. The purpose of this study is to analyze the factors behind the changes in technology used by fishermen and the impact of the changes in fishing technology used by fishermen in Cilacap Regency. Succeeding the modernization of fisheries in 1970-1971, the amount of production produced by fishermen in Cilacap Regency has increased significantly. Nevertheless, the increase in production was accompanied by conflicts between trawler and traditional fishermen. The main trigger of conflict between these two fishermen is the catch gap. In addition, conflicts that occur are also caused by indications of violations of the fishing area by trawler fishermen. In overcoming this problem, the government subsequently issued a regulation in prohibiting trawling fishing gear.*

**Keywords:** Cilacap fishermen; Change; Catching tool; Trawl.

### Abstrak

Artikel ini membahas dua permasalahan, yaitu perubahan teknologi nelayan dan pengaruh perubahan tersebut terhadap aktifitas kenelayanan. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perubahan teknologi yang digunakan oleh para nelayan dan dampak yang dihasilkan dari adanya perubahan teknologi penangkapan yang digunakan oleh para nelayan di Kabupaten Cilacap. Setelah adanya modernisasi perikanan pada 1970-1971, jumlah produksi yang dihasilkan oleh para nelayan di Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan secara signifikan. Namun demikian, peningkatan jumlah produksi ternyata diiringi dengan konflik yang terjadi antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional. Pemicu utama konflik antarnelayan adalah kesenjangan hasil tangkapan. Selain itu, konflik-konflik yang terjadi juga disebabkan karena indikasi pelanggaran wilayah penangkapan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan *trawl*. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan pelarangan terhadap alat tangkap *trawl*.

**Kata Kunci:** Nelayan Cilacap; Perubahan; Alat Tangkap; Trawl.

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, baik besar maupun kecil, terbentang di khatulistiwa dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Barat dan Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan. Luas wilayah Indonesia kurang lebih 9 juta km<sup>2</sup>, yang terbagi atas 3 juta km<sup>2</sup> daratan pulau-pulau dan 6 juta km<sup>2</sup> perairan laut kedaulatan (*sovereignty*) (Wahyono, 2009, pp. 1-2). Sebagai negara maritim, Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengembangkan sektor kemaritiman, khususnya perikanan. Widodo (2007) menyebutkan bahwa pembangunan pada sektor perikanan pascakemerdekaan Indonesia sebenarnya sudah mulai dilakukan pada masa Kabinet Kerja IV Soekarno dengan membentuk Departemen Perikanan Darat-Laut. Namun demikian, lahirnya departemen ini tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sektor perikanan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena departemen ini hanya bekerja tidak lebih dari setahun, sehingga program-program yang telah dirumuskan tidak berjalan sesuai rencana.

Pada masa Orde Baru (Orba), pembangunan sektor perikanan di Indonesia terlihat menuju pada masa depan yang lebih baik. Walaupun secara kelembagaan pemerintahan Soeharto tidak membentuk satu instansi khusus yang berdiri sendiri untuk mengurus masalah-masalah di sektor perikanan, namun kebijakan-kebijakan pemerintah dianggap berhasil membawa sektor perikanan di Indonesia ke arah yang lebih baik, setidaknya untuk mengurangi ketergantungan impor ikan (Hadi, 2005, p. 159).

Kebijakan yang dianggap mampu memperbaiki sektor perikanan ialah kebijakan modernisasi alat tangkap nelayan. Setelah terjadi perubahan alat tangkap, sektor perikanan di Indonesia berangsur mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat berdasar jumlah produksi yang meningkat dengan signifikan. Namun demikian, dalam perjalanannya, modernisasi alat tangkap nelayan juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan akibat *overfishing*. Selain itu, modernisasi alat tangkap nelayan secara tidak langsung juga telah memicu konflik antarnelayan karena kegiatan *overfishing*. Bailey (1995) bahkan berpendapat bahwa selama 30 tahun (1968-1997), perikanan pesisir di Asia Tenggara telah menjadi medan pertempuran antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah yang mengalami kemajuan dalam dunia perikanan seiring dengan program modernisasi alat tangkap. Namun demikian, sejalan dengan adanya peningkatan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Cilacap, berlangsung juga berbagai ketegangan sosial di tengah-tengah masyarakat nelayan, khususnya antara nelayan-nelayan tradisional dengan nelayan-nelayan modern yang menggunakan *trawl* atau juga dikenal dengan sebutan nelayan *trawl*. Konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok nelayan sering kali bermula dari kecemburuan akibat hasil tangkap nelayan pendatang relatif lebih besar dari nelayan lokal (Satria, 2009, pp. 359-360). Selain itu, konflik juga sering terjadi akibat pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi nelayan *trawl*, khususnya berkaitan dengan wilayah jalur penangkapan.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu perubahan teknologi tangkap nelayan serta dampaknya pada aktivitas kenelayan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini dipandu dengan pertanyaan sebagai berikut; *pertama*, apa yang melatarbelakangi terjadinya perubahan teknologi perikanan di Kabupaten Cilacap; *kedua*, bagaimana dampak perubahan teknologi perikanan terhadap hubungan antarnelayan di Kabupaten Cilacap; *ketiga*, bagaimana bentuk penyelesaian dari permasalahan yang ditimbulkan dari adanya modernisasi perikanan di Kabupaten Cilacap.

Kajian tentang penggunaan alat tangkap dan konflik antar nelayan telah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti Kusnadi, Fauzi, dan Tomba. Kusnadi (2006) lebih banyak menyoroti kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan. Ia menyebutkan bahwa modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum memenuhi target, justru yang terjadi masih sebaliknya yakni kerentanan sosial ekonomi dalam masyarakat serta permasalahan lingkungan. Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Fauzi (1981) berisi perkembangan *trawl* di Indonesia. Selain itu, juga terdapat beberapa kasus permasalahan atau konflik yang terjadi akibat perkembangan *trawl*. Pembahasan diakhiri paparan mengenai regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menahan konflik yang terjadi antara masyarakat nelayan. Perbedaan kajian ini adalah lebih kepada lingkup wilayah. Jika kajian Fauzi lebih bersifat umum karena ruang lingkungannya Indonesia, kajian ini membahas secara mikro tentang perubahan penggunaan alat tangkap serta pengaruhnya terhadap perkembangan aktifitas kenelayan di Cilacap.

Kajian tentang kondisi perikanan di Kabupaten Cilacap setelah pelarangan penggunaan jaring *trawl* oleh pemerintah melalui Keppres No. 39 Tahun 1980 juga dibahas oleh Tamba. Berdasar hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa setelah pelarangan penggunaan jaring *trawl*, jumlah produksi, frekuensi *trip* perahu nelayan, harga komoditas hasil laut, sistem bagi hasil, hingga mobilitas para nelayan mengalami penurunan (Tamba, 1981). Kajian yang dilakukan oleh Tamba (1981) lebih membahas pada aktifitas ekonomi masyarakat, sedang dalam kajian ini disentuh aspek perubahan sosial, ekonomi, dan konflik. Dari beberapa kajian yang telah dibahas di atas, maka kajian diharapkan dapat melengkapi fakta-fakta tentang perubahan penggunaan alat tangkap serta dampaknya terhadap aktifitas kenelayan, guna memperoleh gambaran yang lebih banyak tentang dunia kemaritiman di Kabupaten Cilacap.

## Metode

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu berdasar data yang diperoleh (Gottschalk, 2008, p. 39). Pada proses merekonstruksi peristiwa sejarah, Kuntowijoyo (1995, p. 90) berpendapat bahwa dalam melakukan penelitian sejarah, sejarawan harus melalui lima langkah hingga pada akhirnya berhasil melakukan rekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Adapun langkah-langkah tersebut adalah pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (analisis sumber), dan penulisan. Sumber primer yang digunakan dalam penyusunan artikel ini salah satunya adalah *Dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Tahap Kedua Kabupaten Cilacap (1874/1875-1978/1979), Buku Ke 2 (Ekonomi)*. Selain itu, artikel ini juga disusun dengan menggunakan pustaka buku serta artikel-artikel dari jurnal, baik nasional maupun internasional yang relevan.

## Perkembangan teknologi penangkapan ikan di Kabupaten Cilacap

Nelayan-nelayan di Kabupaten Cilacap merupakan nelayan tradisional yang masih menggunakan peralatan sederhana ketika mereka melaut. Kesederhanaan tersebut setidaknya dapat dilihat dari tiga hal, yaitu: bentuk atau jenis perahu, tenaga penggerak perahu, serta alat tangkap yang mereka gunakan untuk menangkap ikan dan udang. Perahu tradisional yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Cilacap pada umumnya sama dengan perahu yang digunakan oleh nelayan-nelayan di pantai utara Pulau Jawa, seperti *jukung*, *payang*, dan *compreng*.

Berdasar bentuknya, perahu *jukung* yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Cilacap merupakan perahu terbuat dari sebatang kayu jati dan tergolong dalam perahudengan kapasitas muatan yang relatif kecil. Rata-rata ukuran perahu ini adalah sepanjang 5 m dan lebar 0,75 m dengan kapasitas muatan hanya mencapai kurang dari 1 ton. Adapun jumlah awak operator kapal adalah sebanyak dua hingga tiga orang. Alat tangkap yang digunakan biasanya adalah pancing yang terbuat dari senar atau jaring *kopet*. Sebagai tenaga penggerak, perahu ini tidak menggunakan mesin, melainkan *layer* atau *dayung* sebagai tenaga penggerak.

Sama seperti perahu *jukung*, jenis perahu *payang* juga termasuk perahu dengan kapasitas muatan yang relatif kecil. Rata-rata panjang ukuran perahu *payang* adalah 5-12 m, lebar 1-2,75 m, dan tinggi 0,75- 1,5 m dengan muatan sebanyak satu ton (Adriyanti, 2004, p. 79). Sebagai tenaga penggerak, perahu ini dilengkapi dengan mesin bermotor. Hal tersebut dapat dilihat berdasar bentuk buritan yang berfungsi sebagai tempat meletakkan mesin perahu.

Berbeda dari kedua jenis perahu di atas, perahu *compreng* merupakan jenis perahu yang relatif berukuran lebih besar. *Perahu compreng* memiliki rata-rata ukuran panjang 8 m dan lebar 1,5 m dengan muatan mencapai 2 ton. Sebagai tenaga penggerak, perahu jenis ini menggunakan layar dan mesin tempel. Layar masih berfungsi sebagai alat penggerak utama dan mesin tempel digunakan jika tidak ada angin yang mendorong laju perahu dan pada lokasi-lokasi tertentu yang membutuhkan gerak lebih lincah, seperti saat keluar-masuk pelabuhan atau pada saat keluar-masuk muara sungai (Pradjoko & Utomo, pp. 73-74).

Sejauh mana kemampuan alat tangkap yang digunakan dapat dilihat berdasar jumlah hasil tangkap yang mereka hasilkan. Pada 1969-1971, jumlah produksi ikan terus mengalami penurunan. Pada 1969, jumlah produksi ikan mencapai 3.518.786 Kg. Pada 1971, jumlah tersebut turun menjadi 1.490.973 Kg. Penurunan jumlah hasil tangkap ikan di Kabupaten Cilacap pada 1969-1971 disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena keterbatasan alat produksi, serta fenomena “demam” udang yang menyasar para nelayan di Kabupaten Cilacap. Pada tahun yang sama, jumlah produksi udang sebanyak 84.354 Kg (1969) dan meningkat duakali lipat menjadi 195.255 Kg pada 1971 (BPS Kabupaten Cilacap, 1973, p. 145; Bappeda Kabupaten Cilacap, 1979, p. 42).

Masuk pada 1971, jumlah produksi berangsur-angsur mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena pembangunan berbagai infrastruktur yang menunjang aktivitas perikanan, seperti: tempat *landing* kapal/perahu, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bengkel

kapal/perahu, toko, hingga pasar ikan). Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kredit kepada nelayan-nelayan di Kabupaten Cilacap yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Kehadiran nelayan-nelayan pendatang dengan membawateknologi penangkapan yang dinilai lebih modern dari yang biasa digunakan oleh nelayan-nelayan di Kabupaten Cilacap juga memberikan dampak yang baik terhadap produksi perikanan. Pada umumnya, mereka merupakan nelayan-nelayan besar yang datang dari Jakarta, Pelabuhan Ratu, Cirebon, Tegal, dan Bagan Siapi-api. Orang-orang Bagan merupakan kelompok nelayan pendatang yang paling dikenal, karenaperawakannya mudah untuk dikenali.

Orang-orang Bagan jugalah yang telah memperkenalkan teknologi modern kepada nelayan di Kabupaten Cilacap. Hal tersebut dapat dilihat dari alat tangkap yang mereka gunakan ketika melaut. Pada umumnya, keberadaan nelayan-nelayan di Indonesia yang berasal dari Bagan Siapi-api selalu diasosiasikan dengan kapal pukat atau kapal *trawl*. Legitimasi tersebut tentu tidak terlepas dari kenyataan bahwa kapal-kapal tersebut memang dibuat dan berasal dari Bagan Siapi-api (Tobing, 1980).

Pada 1971, kapal-kapal yang berasal dari Bagan mulai terlihat keberadaannya di perairan Kabupaten Cilacap. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah kapal-kapal tersebut terus bertambah hingga terdapat 179 kapal *trawl* yang beroperasi di perairan Cilacap. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak perahu nelayan tradisional, keberadaannya mampu memberikan dampak bagi pertumbuhan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Cilacap. Pada 1972, produksi ikan di Kabupaten Cilacap hanya mencapai 4.479.755 kg. Sedangkan pada 1977, jumlah produksinya mampu mencapai 14.461.754 kg atau lebih dari tiga kali lipat hanya dalam waktu lima tahun. Menurut Suharto (Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, lebih dari 80% jumlah produksi perikanan dikuasai oleh nelayan-nelayan modern, sedangkan sisanya merupakan "jatah" untuk nelayan-nelayan tradisional (Maruli & Subangun, 1980).

Secar teknis, tipe kapal-kapal *trawl* ini merupakan kapal yang seluruh bagian bangunannya menggunakan kayudengan beban berat kapal seberat 30 *gross ton* dan kecepatan rata-rata kapal ini mencapai 100-200 *horse power* (Bailey, 1997, p. 226). Waktu yang dibutuhkan untuk setiap kali operasi adalah sekitar tujuh sampai dengan 10 hari (rata-rata 8,5 hari) dengan mesin yang diusahakan hidup 24 jam nonstop. Kecepatan kapal pada waktu menarik pukat, rata-rata 3,5 mil/jam. Dalam sehari, pukat tersebut diangkat sebanyak enam kali ke atas kapal untuk diambil isinya. Pukat yang diangkat biasanya berbobot 300 sampai dengan 500 kg. Setelah selesai menaikkan ikan ke atas kapal, jaring dijatuhkan ke laut untuk diseret kembali (Tobing, 1980). Berdasar cara kerja tersebut, secara kasar dapat dihitung berapa banyak jumlah produksi dan pendapatan yang dihasilkan oleh kapal-kapal *trawl*. Jika dalam satu hari mereka mengangkat jarring enam kali dengan bobot satu kali angkat sebanyak 300 kg, maka jumlah produksi yang dihasilkan oleh satu kapal *trawl* dalam satu hari adalah 1,2 ton. Sedangkan setiap beroperasi, kapal ini rata-rata membutuhkan waktu hingga 8 hari. Dengan demikian, sampai kapal-kapal tersebut kembali ke pangkalannya, jumlah hewan laut yang mereka hasilkan kira-kira mencapai 9,6 hingga 10 ton.

Melihat jumlah produksi tersebut, pendapatan secara kasar menjadi mudah untuk diterka. Jika harga ikan per kilogram pada saat itu adalah Rp50,-, maka kira-kira pendapatan yang dihasilkan dapat mencapai Rp500.000. Jumlah tersebut baru dihitung dari operasi satu kapal *trawl*, sedangkan kapal *trawl* yang terdapat di Kabupaten Cilacap hingga 1973 adalah 179 unit. Jika diakumulasi, penghasilan kapal-kapal modern dalam satu kali operasi adalah sekitar Rp89.500.000. Jika dalam satu bulan kapal tersebut beroperasi tiga kali, maka jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh kapal tersebut diperkirakan mencapai Rp3.222.000.000,- per tahun.

### **Pengaruh perubahan alat tangkap nelayan terhadap aktivitas kenelayan**

Kemunculan teknologi baru juga melahirkan produksi perikanan baru, yaitu cara produksi modern dan tradisional. Penggunaan dua teknologi yang berbeda ini tentu menimbulkan perbedaan hasil produksi penangkapan. Perbedaan jumlah produksi ikan yang dihasilkan antara nelayan *trawl* dan nelayan tradisional dapat dilihat berdasar jumlah produksi per trip

dan per musim. Produksi rata-rata nelayan tradisional tanpa motor hanya mencapai 19,03 kg per trip dengan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam satu kali operasi selama 10 jam. Nelayan tradisional yang menggunakan mesin motor tempel, jumlah produksinya dapat mencapai 76,69 kg per trip dengan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam satu kali beroperasi adalah selama satu sampai dua hari. Namun demikian, jumlah produksi yang dihasilkan oleh nelayan tradisional tersebut, baik nelayan yang menggunakan mesin maupun tidak, masih sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan produksi rata-rata nelayan trawl. Pada umumnya, dalam satu kali beroperasi kapal-kapal trawl ini membutuhkan waktu hingga satu minggu dengan jumlah produksi mencapai 910,95 kg. Artinya, dalam satu hari mereka dapat memperoleh hasil laut sebanyak 130 kg atau dengan kata lain tiga hingga tujuh kali lipat dari hasil yang diperoleh nelayan-nelayan tradisional (Joenoed *et al.*, 1979, p. 28).

Banyaknya jumlah kapal *trawl* yang beroperasi di perairan Cilacap menyulitkan petugas Keamanan Laut (KAMLA) dalam proses pengawasan. Mereka bahkan tidak dapat berbuat banyak karena tidak memiliki kapal dalam jumlah banyak untuk melakukan patroli pengawasan di laut ("Lima Kapal *Trawl*," 1979). Rendahnya intensitas pengawasan terhadap aktivitas kapal-kapal *trawl*, menyebabkan banyak nelayan-nelayan *trawl* yang melanggar jalur penangkapan nelayan tradisional yang letaknya berada pada jalur penangkapan I dan jalur penangkapan II. Faktor penyebab pelanggaran tersebut cukup beragam seperti faktor ekonomi, hukum, hingga ilmu pengetahuan.

Menurut Dahler Nasution, selaku Koordinator Undus Tugas Keamanan Laut (UGAS KAMLA), baik Undang-Undang Perikanan Pantai tahun 1927, maupun SK Menteri Pertanian Nomor 607, 608, dan 609 tahun 1976 semuanya tidak mengakomodasi kasus pelanggaran kapal *trawl* (Pour, 1978). Sebagai akibat dari pelanggaran jalur penangkapan, konflik antar nelayan tradisional dan nelayan *trawl* pun tidak terhindarkan. Selama kurun waktu tiga tahun (1977-1979) terdapat beberapa peristiwa konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok nelayan di Kabupaten Cilacap.

Pada Oktober 1977, dua buah kapal *trawl* berkekuatan 120 PK yang berasal dari kelompok nelayan Kawan Setia dan kelompok nelayan Hasil Maju diserbu oleh lima puluh nelayan tradisional dengan menggunakan lima perahu bermotor. Setelah berhasil menangkap kedua kapal tersebut, nelayan-nelayan tradisional kemudian menganiaya orang-orang yang bekerja di atas kapal. Selain itu, para nelayan tradisional juga mengambil alih kemudi kapal dan menabrakkannya ke sebelah utara pantai Teluk Penyus hingga tenggelam ("Dua Kapal *Trawl*," 1977).

Pada 24 November 1978, sebuah kapal Pukat Harimau bernama KM Bhakti Tiga dikejar oleh beberapa nelayan tradisional. Setelah berhasil mendapatkan kapal tersebut, mereka memukuli nakhoda kapal dan menyita buku kapalnya serta merusak empat mesin kapal. Peristiwa tersebut mengakibatkan 10 orang nelayan yang diduga terlibat ditangkap dan ditahan oleh pihak keamanan. Para petugas yang turut mengawasi mengimbau kepada para nelayan agar bersabar dan menjanjikan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak menurut hukum yang berlaku, termasuk kepada kapal-kapal Pukat Harimau yang melanggar daerah penangkapan ikan nelayan tradisional ("Kemarahan Nelayan," 1978).

Kasus selanjutnya adalah dua keributan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Peristiwa pertama terjadi pada Rabu 22 Agustus 1979. Pada saat itu, dua buah kapal *trawl* yang berasal dari kelompok nelayan Tar Jaya dan kelompok nelayan Heli Jaya sedianya akan mendarat di pangkalannya yang terletak di Pantai Sintolokwat. Namun demikian, belum sampai ke pangkalannya, kedua kapal tersebut termasuk dengan pekerjanya yang berjumlah delapan orang ditenggelamkan oleh nelayan-nelayan tradisional di pantai Semiring Tengah dekat pulau Nusakambangan ("Lima Kapal *Trawl*," 1979).

Peristiwa kedua terjadi tiga hari kemudian, sekitar 75 sampai 100 orang nelayan tradisional menghadang tiga kapal *trawl*, yaitu Primaju Jaya, Pulau Ikan, dan Kembang Jaya yang juga akan melakukan pendaratan di pangkalan di Tolokawat. Para nelayan tradisional merusak seluruh peralatan melaut kapal-kapal *trawl* serta membuang seluruh surat perizinan ke laut. Setelah puas merusak peralatan yang ada di atas kapal, para nelayan tradisional kemudian menenggelamkan ketigakapal *trawl* tersebut ("Lima Kapal *Trawl*," 1979).

Berdasar pertimbangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kelestarian sumber perikanan dasar dan dalam rangka mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan tradisional serta untuk menghindari terjadinya konflik antarnelayan, pemerintah merasa perlu untuk mengambil keputusan. Salah satu keputusan yang mendesak adalah pelarangan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl*. Oleh sebab itu, pada 1980, pemerintah melarang kapal-kapal yang menggunakan jaring *trawl* beroperasi. Pelarangan tersebut berdasar Keppres Nomor 39 tahun 1980 mengenai penghapusan jaring *trawl*.

Namun demikian, keputusan untuk melarang penggunaan jaring *trawl* di berbagai daerah yang sering terjadi konflik nampaknya seperti buah simalakama. Jika tidak dilarang penggunaannya akan menimbulkan permasalahan dan jika dilarang juga akan menimbulkan permasalahan baru. Terdapat beberapa dampak yang dihasilkan dari pelarangan penggunaan jaring *trawl*. Dampak positif yang dihasilkan dari keputusan ini adalah dapat mendorong peningkatan produksi sumber daya perikanan dan penghasilan nelayan tradisional, membuka akses mereka terhadap pasar yang lebih luas, serta menghindari usaha nelayan-nelayan tradisional dari gangguan kapal-kapal *trawl* yang berujung pada terjadinya konflik antarnelayan (Fauzi, p. 157).

Di sisi lain, Tamba (1981) menyebutkan bahwa dampak lain yang berakibat pada sektor perikanan akibat pelarangan *trawl* di Kabupaten Cilacap adalah penurunan produktivitas industri-industri perikanan. Seperti yang diketahui bahwa alat tangkap *trawl* merupakan alat tangkap yang bersifat efek ganda (*multiplier effect*). Kehadiran kapal-kapal *trawl* selain membantu meningkatkan produksi hasil laut, juga mampu membuka usaha-usaha baru yang pada akhirnya dapat membuka lapangan kerja baru, baik di atas kapal sebagai anak buah kapal maupun di luar sektor perikanan tangkap, seperti buruh pabrik pengelolaan hasil laut. Usaha-usaha baru tersebut antara lain mencakup pabrik es, pabrik penyimpanan (*cold storage*), serta industri-industri pengasinan ikan.

## Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan analisis, penulis menyimpulkan bahwa hal yang melatarbelakangi pemerintah melakukan modernisasi di Kabupaten Cilacap disebabkan karena adanya kontradiksi antara ketersediaan sumber daya laut dan rendahnya kapabilitas para nelayan dalam memproduksi sumber daya laut.

Sementara itu, peningkatan jumlah produksi yang cukup signifikan terjadi antara lain disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya bantuan kredit untuk memotorisasi perahu-perahu para nelayan dan banyaknya nelayan-nelayan pendatang yang membawa teknologi penangkapan yang lebih modern. Kemunculan teknologi baru juga melahirkan cara produksi baru. Namun demikian, hal itu telah memicu persaingan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Kesenjangan hasil tangkapan antara nelayan tradisional dan modern telah memicu konflik. Berbagai konflik yang terjadi telah mendorong pemerintah untuk bertindak, hingga berujung pada pelarangan alat tangkap *trawl*. Namun sekali lagi, tindakan pemerintah juga harus berhadapan dengan kenyataan-kenyataan yang dilematis. Di satu sisi, aturan tersebut telah memberi ruang kepada para nelayan tradisional. Namun di lain sisi, aturan itu juga harus membenturkan masyarakat nelayan pada kenyataan bahwa produksi perikanan menurun drastis dan menyebabkan penurunan pula pada sektor lain, seperti pabrik pengasinan ikan, pabrik es, dan pabrik penyimpanan.

## Referensi

- Adrianti, I. (2004). *Perahu Sunda: Kajian hiasan pada perahu nelayan di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
- Bailey, C. (1997). Lesson from Indonesia's 1980 trawler ban. *Jurnal Marine Policy*, 21(3), 225-235.
- Bappeda Kabupaten Cilacap (1978/1979). *Dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Tahap Kedua Kabupaten Cilacap (1874/1875-1978/1979)*, Buku Ke 2 (Ekonomi).
- BPS Kabupaten Cilacap (1973). *Buku statistik Kabupaten Daerah TK: II Cilacap tahun 1973*. Badan

- Pusat Statistik Kabupaten Cilacap.
- Dua Kapal *Trawl* diserbu nelayan. (11 Oktober 1977). *Kompas*.
- Fauzi, S. (1981). *Trawl, perkembangan dan permasalahannya di Indonesia* (Skripsi). Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Gottschalk, L. (1983). *Mengerti sejarah* (Nugroho Notosusanto, *Trans.*). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hadi, S. (2005). *Strategi pembangunan Mahatir dan Soeharto: Politik industrialisasi dan modal Jepang di Malaysia dan Indonesia*. Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Joenoed, G. R. S., et al. (1979). *Pengaruh pengurangan jumlah Kapal Trawl (Pukat Harimau) terhadap kehidupan nelayan dan produksi ikan di Daerah Cilacap*. Semarang: Pusat Riset dan Pengembangan Undip.
- Kemarahan nelayan Cilacap dapat diredakan. (29 November 1978). *Kompas*.
- Kuntowijoyo (1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Kusnadi (2006). *Konflik sosial nelayan: Kemiskinan dan perebutan sumber daya alam*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Lima Kapal *Trawl* ditenggelamkan nelayan Tradisional. (30 Agustus 1979). *Kompas*.
- Maruli & Subangun (4 Januari 1980). Proses sosial dan ekonomi masyarakat nelayan (2): Pukat-Harimau meruntuhkan kelestarian lingkungan hidup. *Kompas*.
- Pour, J. (4 Januari 1978). Apa yang sebenarnya terjadi di Cilacap. *Kompas*.
- Pradjoko, D. & Utomo, Bambang Budi (2013). *Atlas pelabuhan-pelabuhan bersejarah di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Satria, A. (2009). *Ekologi politik nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Tamba, H. (1981) *Studi pendahuluan pendapatan nelayan non-trawl dan mobilisasi tenaga kerja setelah penghapusan Trawl (Studi kasus di Cilacap Jawa-Tengah)*. Bogor: IPB Fakultas Perikanan.
- Tobing, M. U. (7 Januari 1980). Proses sosial dan ekonomi masyarakat nelayan (4): Nasib para Tai Kong. *Kompas*.
- Wahyono S. K. (2009). *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju.
- Widodo, S. K. (2007). *Dinamika kebijakan terhadap nelayan: Tinjauan historis pada nelayan pantai utara Jawa, 1900-2000*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.